

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sepanjang periode penelitian, kinerja ekonomi DOB memiliki tren peningkatan setiap tahunnya, begitu juga dengan kedua wilayah lainnya meski pada akhir tahun periode penelitian (2018) terjadi penurunan. Beberapa tahun terakhir kinerja ekonomi daerah pada DOB juga selalu lebih tinggi, kecuali pada tahun 2018. Perkembangan kinerja ekonomi DOB dan daerah induk menunjukkan pola yang hampir sama. Secara keseluruhan DOB memiliki tren peningkatan yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah induk maupun daerah kontrol.
2. Kinerja keuangan pemerintah DOB memiliki tren peningkatan setiap tahunnya dan rata-rata selalu lebih tinggi daripada daerah induk (kecuali tahun 2015 dan 2016) dan daerah kontrol (kecuali tahun 2013-2017). Meski kinerja keuangan daerah induk berada di bawah DOB, namun pola perkembangan kinerjanya hampir sama.
3. Kinerja pelayanan publik DOB relatif berfluktuasi setiap tahunnya, namun pada awal dan akhir tahun periode penelitian kinerja pelayanan publik DOB lebih tinggi daripada daerah induk maupun daerah kontrol.

4. Pada awal tahun pemekaran wilayah dan pada beberapa tahun akhir periode penelitian (2016 dan 2017), kinerja aparaturn pemerintah DOB lebih baik daripada daerah induk maupun daerah kontrol. Kinerja aparaturn pemerintah daerah DOB lebih besar daripada daerah kontrol pada hampir semua periode penelitian kecuali pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup besar pada DOB.
5. Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan keuangan dari DOB dapat lebih tinggi daripada daerah induknya. Kinerja pelayanan publik DOB yang masih berfluktuasi setelah pemekaran dianggap masih dalam keadaan yang normal, karena kinerja keterbatasan periode penelitian yang hanya 11 tahun. Kinerja aparaturn pemerintah DOB juga sudah bisa setara daerah induknya, meski terjadi penurunan pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi bukan karena penurunan kualitas kinerja aparaturn pemerintah DOB, namun karena dampak dari pembenahan kinerja.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pemekaran wilayah yang dilakukan pada Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah secara keseluruhan memiliki kinerja yang baik, namun jika pemerintah ingin melakukan kembali pemekaran wilayah pada daerah lain perlu pengkajian ulang dari kesiapan kedua wilayah baik daerah yang akan menjadi daerah otonomi baru maupun daerah asal yang akan mengalami pemekaran dari

semua aspek. Secara umum pada saat pemekaran wilayah dilakukan pemerintah lebih fokus melihat kesiapan dari daerah yang akan menjadi otonomi baru.

Pemekaran wilayah yang dilakukan pada Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, jika dilihat secara keseluruhan keduanya memang berjalan dengan baik. Namun, jika melihat dari sektor ekonomi setelah pemekaran wilayah yang dilakukan tingkat pertumbuhan dari daerah induk mengalami penurunan, karena pada saat pemekaran dilakukan daerah induk kehilangan sektor-sektor yang selama ini menjalankan roda perekonomiannya. Oleh karena itu akan lebih baik jika pemerintah melakukan pemekaran wilayah lebih memperhatikan pemerataan. Pemerataan baik dari segi ekonomi maupun persebaran pelayanan publik masih harus diperhatikan kembali, karena kebijakan yang dilakukan pada Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah masih tidak memperhatikan pemerataan dari beberapa sektor, khususnya sektor ekonomi.

Penelitian ini secara keseluruhan masih memiliki kekurangan, karena pada penelitian ini hanya melihat keseluruhannya dari kabupatennya saja dan juga hanya melihat perbandingan wilayah yang terintervensi pemekaran setelah pemekaran itu dilakukan, karena keterbatasan data yang tersedia. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga meneliti lebih terperinci dari masing-masing kecamatan tidak hanya kabupaten secara keseluruhan dan juga membandingkan wilayah-wilayah yang terintervensi pemekaran sebelum dan sesudah pemekaran tidak hanya setelah pemekaran agar perkembangan yang digambarkan akan lebih menampilkan keasaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kubu Raya, (2009), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.
- BPS Mempawah, (2009), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.
- BPS Kalimantan Barat, (2009), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat
- BPS Kubu Raya, (2010), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.
- BPS Mempawah, (2010), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.
- BPS Kalimantan Barat, (2010), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat
- BPS Kubu Raya, (2011), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.
- BPS Mempawah, (2011), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.
- BPS Kalimantan Barat, (2011), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat
- BPS Kubu Raya, (2012), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.

BPS Mempawah, (2012), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2012), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2013), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu
Raya.

BPS Mempawah, (2013), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2013), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2014), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu
Raya.

BPS Mempawah, (2014), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2014), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2015), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu
Raya.

BPS Mempawah, (2015), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2015), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2016), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.

BPS Mempawah, (2016), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2016), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2017), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.

BPS Mempawah, (2017), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2017), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2018), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.

BPS Mempawah, (2018), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.

BPS Kalimantan Barat, (2018), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat

BPS Kubu Raya, (2019), Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kubu Raya.

BPS Mempawah, 2019, Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah.

- Bappenas dan UNDP, (2007), "Studi Evaluasi Pemekaran Daerah", 4 July 2007, diakses dari <http://bappenas.go.id/> pada tanggal 20 April 2019.
- Bappenas dan Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, (2008), *Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru Tahun 2008*, Ringkasan Eksekutif, Direktorat Otonomi Daerah, Jakarta.
- Brata, G., (2007), "Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs. Kepentingan Elit", Fakultas Ekonomi/Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Endaryanto, Teguh, Muhamad Firdaus, Hermanto Siregar, Dedi Budiman Hakim, "The Impact of Regional Expansion on Economic Structure: A Case Study in Lampung Province, Indonesia", *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, XXIII (2), pp. 1-8.
- Fitriani, Fitria, Hofman Bert dan Kai Kaser, (2005), "Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralising Indonesia." *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, XLI (1), pp. 57-79.
- Herawati, Nunik Retno, (2013), "Pemekaran Daerah di Indonesia", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, II (1), pp 57-65.
- Humpro Sekda Kabupaten Kubu Raya, "Sejarah Kabupaten Kubu Raya", *Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya*, diakses dari <http://humprokuburaya.com/> pada tanggal 05 Maret 2018.
- Ida, Laode, (2005), "Pemekaran Daerah: Solusi atau Masalah?", *Media Indonesia*, 22 Maret 2005 diakses dari <http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/> pada tanggal 05 Maret 2019.

- Khairullah, dan Malik Cahyadi, (2006), “Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, XI (3) Desember 2006, hal. 261-277.
- Pemda Kalbar, (2016), “Pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat Bukan Lagi Wacana”, *Berita dan Kegiatan*, diaskes dari <http://kalbarprov.go.id/> pada tanggal 05 Maret 2019.
- Percik, (2007), “Proses dan Implikasi Sosial-Politik Pemekaran: Studi Kasus di Sambas dan Buton”, *USAID Democratic Reform Support Program (DRSP) dan Decentralization Support Facility (DSF)*, Jakarta.
- Poernomosidi, (1979), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Puspen Kemendagri, (2019) “Kemendagri Mengkaji Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) secara Mendalam”, *Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri*, 24 Januari 2019 diaskes dari <http://www.kemendagri.go.id/> pada tanggal 05 Maret 2019.
- Rachim, R. F. (2013). “Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah”, *Skripsi*.
- Riani, Ida Ayu Purba dan M. Pudjihardjo, (2012), “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan, dan Ketimpangan Antarwilayah di Provinsi Papua”, *Jurnal Bumi Lestari*, XXII (1), Februari 2012, hal, 137-148.
- Yuliadi, I. (2012). “Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia, hal. 276—287.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INDEKS KINERJA EKONOMI DAERAH

| Tahun | Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) | | |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Kabupaten Kubu Raya (DOB) | Kabupaten Mempawah (Daerah Induk) | Daerah Kontrol |
| 2008 | 0 | 52,40354677 | 4,358277052 |
| 2009 | 29,37826416 | 41,20676589 | 29,20956852 |
| 2010 | 38,52678155 | 37,88772016 | 42,32685856 |
| 2011 | 49,50883507 | 50,22778513 | 61,08193529 |
| 2012 | 53,83182437 | 38,87599753 | 63,73776369 |
| 2013 | 67,80079997 | 54,6041826 | 80,75589886 |
| 2014 | 72,94033408 | 63,09014637 | 69,81253491 |
| 2015 | 80,7958291 | 72,77830481 | 67,37387701 |
| 2016 | 88,46799909 | 79,58981998 | 78,85846996 |
| 2017 | 86,62231154 | 82,50532407 | 79,19032089 |
| 2018 | 73,54705485 | 77,34084967 | 62,02929296 |

LAMPIRAN 2
INDEKS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| Tahun | Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) | | |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | Kabupaten Kubu Raya (DOB) | Kabupaten Mempawah (Daerah Induk) | Daerah Kontrol |
| 2008 | 54,96273138 | 56,60832829 | 15,93626565 |
| 2009 | 39,83241618 | 65,74853547 | 23,24848686 |
| 2010 | 47,42246521 | 32,41161887 | 34,63410391 |
| 2011 | 57,18076169 | 39,93486047 | 32,92634282 |
| 2012 | 54,57054353 | 44,15051426 | 33,7033195 |
| 2013 | 59,23756236 | 45,10279062 | 61,98121481 |
| 2014 | 65,70272122 | 71,65970316 | 39,83002554 |
| 2015 | 55,97017214 | 88,43184113 | 61,32876087 |
| 2016 | 62,06854013 | 69,28406514 | 66,15917982 |
| 2017 | 70,20209014 | 62,09044739 | 65,86539919 |
| 2018 | 69,98113723 | 68,1266229 | 44,04477731 |

LAMPIRAN 3
INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK

| Tahun | Indeks Kinerja Pelayanan Publik (PPI) | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Kabupaten Kubu Raya (DOB) | Kabupaten Mempawah (Daerah Induk) | Daerah Kontrol |
| 2008 | 53,78499615 | 30,46140907 | 41,7269044 |
| 2009 | 53,83399274 | 47,18420117 | 43,1239655 |
| 2010 | 48,39122227 | 71,10987476 | 58,2954709 |
| 2011 | 39,16807086 | 53,88721342 | 66,5954531 |
| 2012 | 32,47300289 | 57,40897116 | 43,9172196 |
| 2013 | 37,15278728 | 44,42576316 | 49,7346011 |
| 2014 | 49,85687327 | 44,73896667 | 63,3807481 |
| 2015 | 49,82571718 | 37,92605679 | 39,9979517 |
| 2016 | 42,03793986 | 36,66651829 | 53,2805018 |
| 2017 | 44,85136447 | 28,52534305 | 39,5960818 |
| 2018 | 54,69241616 | 36,29418067 | 37,8541738 |

LAMPIRAN 4
INDEKS KINERJA APARATUR PEMERINTAH

| Tahun | Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah (IKA) | | |
|-------|--|--------------------------------------|-------------------|
| | Kabupaten Kubu Raya (DOB) | Kabupaten Mempawah (Daerah Induk) | Daerah Kontrol |
| 2008 | 49,08938279 | 0 | 3,631244669 |
| 2009 | 65,67017911 | 20,68632238 | 18,99080421 |
| 2010 | 55,98108112 | 51,82298742 | 15,00976008 |
| 2011 | 51,79679627 | 49,29850322 | 30,1871021 |
| 2012 | 51,18428682 | 80,71146081 | 31,69727318 |
| 2013 | 50,28131162 | 66,59700889 | 39,05333324 |
| 2014 | 49,69399045 | 61,72986245 | 43,41789026 |
| 2015 | 48,52434736 | 71,9216345 | 47,23993172 |
| 2016 | 56,82746361 | 47,32707872 | 50,99114705 |
| 2017 | 100 | 90,0420363 | 48,0386289 |
| 2018 | 0 | 66,55777152 | 100 |